BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG pada Biro Kepegawaian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan ketepatan dalam pendistribusian data kepegawaian kepada SIIMPEG dari masing-masing SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering terjadi keterlambatan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurang cepat tanggapnya para aparatur dalam meng*update* data kepegawaian setiap terjadi perubahan identitas atau status kepegawaian dari para aparatur.
2. Ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dari peraturan ditingkat pusat sudah tersedia dengan baik yang menjadi dasar dalam penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada regulasi Keputusan Menteri dalam negeri No. 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Namun pada tingkat daerah

belum adanya sebuah regulasi khusus untuk mengatur dalam pengelolaan SIMPEG secara teknis.

3. Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sudah cukup baik. namun yang menjadi kendala adalah dalam melakukan komunikasi melalui jaringan komputer sebagai salah satu sarana untuk lebih memudahkan dalam pendistribusian perubahan data pegawai. Kendala yang dihadapi tersebut dikarenakan jumlah aparatur di setiap instansi atau SKPD yang dapat menggunakan jaringan komputer masih terbatas. Selain itu belum adanya petunjuk teknis dalam penggunaaan jaringan komputer tersebut sehingga terkadang menyulitkan aparaturnya sendiri.
4. Ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sudah cukup memadai apabila hanya dijadikan sebagai *user* saja. Tapi yang menjadi kendala adalah belum tersedianya aparatur yang punya kemampuan untuk menjadi seorang analis sistem sekaligus punya pengetahuan mendalam di bidang kepegawaian.
5. Ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Tetapi dalam mengaplikasikannya terdapat beberapa kendala, seperti jaringan komputer yang kurang digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan

software pendukung dalam pengembangan SIMPEG tersebut sudah memadai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

6. Strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Strategi pemikiran pemimpin dalam hal ini Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat sudah cukup optimal. Dilihat dari komitmennya untuk terus mengembangkan SIMPEG sebagai alat pendukung keputusan di bidang kepegawaian. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai sistem informasi yang didapat dari pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan penerapan *e-Government*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, hendaknya terus mensosialisasikan kepada masing-masing SKPD tentang pentingnya suatu pendistribusian data kepegawaian melalui SIMPEG melalui pendekatan-pendekatan yang terarah dan tepat sasaran

disertai ketegasan dari pihak pengelola SIMPEG, agar pengolahan data dapat berjalan secara optimal dengan meghasilkan data yang berkualitas dan terhindar dari ketidakakuratan data.

2. Ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat peraturan secara teknis tentang pelaksanaan penerapan *e-Government* khususnya SIMPEG. Agar dalam pengelolaan SIMPEG dapat berjalan lebih baik lagi terutama dalam memecahkan masalah tentang kurangnya kesadaran para aparatur tentang pentingnya *updating* data kepegawaian. Dengan adanya peraturan lebih rinci dan khusus tersebut akan timbul suatu ketegasan untuk membangkitkan kesadaran para aparatur dalam *updating* data.
3. Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik Namun hendaknya lebih sering memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi melalui jaringan komputer. Agar dalam berkomunikasi dapat lebih cepat, efektif dan efisien.
4. Ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal pengrekrutan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti kebutuhan akan seorang analis sistem yang mampu mengoptimalkan dalam pengembangan SIMPEG. Dengan mempunyai seorang analis sistem tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

5. Ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terus lebih dperbaharui lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang, agar pengoperasian SIMPEG tersebut dapat dijalankan lebih optimal lagi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya begitu juga dengan pengadaan *software* pendukung lainnya.
6. Strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,. Jika dilihat pemikiran seorang pemimpin tersebut sudah cukup memadai namun hendaknya lebih ditingkatkan lagi baik pengetahuan pemimpin tersebut maupun keahlian dalam bidang *e-Government* khususnya SIMPEG sehingga akan lebih memotifasi para aparaturnya dalam melaksanakan tugas untuk mengolah data kepegawaian.